PENERAPAN APLIKASI SIMANIS DALAM PENGUMPULAN DATA PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Daniel Beny Rizki Manurung
NPP. 32.1044
Asdaf Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: 32.1044@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Rotzami., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The implementation of the SIMANIS (Data and Information Management System) Application in Jayawijaya Regency as a medium for collecting data between Regional Apparatus Organizations (OPD) still faces a number of obstacles, especially related to limited network infrastructure and low digital literacy of OPD apparatus.* ***Objective:*** *This study aims to analyze the Implementation of the SIMANIS Application and identify the obstacles faced in its utilization.* ***Methods:*** *The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, documentation, and supported by questionnaires as simple quantitative data.* ***Results/Findings:*** The results of the study indicate that although SIMANIS is able to improve the efficiency and accuracy of sectoral data management, its implementation has not been optimal due to limited internet connectivity, lack of ongoing training, and differences in readiness between OPDs. ***Conclusion:*** *The conclusion of this study confirms that the success of SIMANIS is greatly influenced by the readiness of infrastructure and human resource competence, so it is necessary to improve training and equalize network development throughout the OPD area.*

Keywords: *SIMANIS, E-Government, Data Collection, OPD, Jayawijaya*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan Aplikasi SIMANIS (Sistem Manajemen Data dan Informasi) di Kabupaten Jayawijaya sebagai media pengumpulan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan infrastruktur jaringan dan rendahnya literasi digital aparatur OPD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Aplikasi SIMANIS. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta didukung oleh kuesioner sebagai data kuantitatif sederhana. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIMANIS mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data sektoral, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan konektivitas internet, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan perbedaan kesiapan antar-OPD. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan SIMANIS sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga perlu dilakukan peningkatan pelatihan dan pemerataan pembangunan jaringan di seluruh wilayah OPD.

Kata kunci: SIMANIS, E-Government, Pengumpulan Data, OPD, Jayawijaya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini pada era digital, hampir dipastikan semua kegiatan pelayanan publik menggunakan media digital. Penggunaan media digital pada saat ini adalah tulang punggung utama komunikasi dan perubahan dalam segala bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik) (Madjid et. al 2024). E-government mulai ramai diperbincangkan dan diterapkan di negara berkembang ketika banyak cerita sukses bagaimana E-government dapat meningkatkan pelayanan publik dan sekaligus meningkatkan performa penyelenggaraan pemerintahan sebagai publik service provider (Wargadinata, 2021). Menurut penelitian dari (Fatimah & Ruhana, 2023), untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman bagi penduduknya, diperlukan upaya dan solusi cerdas,dengan penerapan dan kolaborasi ekosistem kota yang masuk ke dalam konsep smart city dengan menggunakan konsep yang berbasis teknologi dan IT. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan urusan pemerintahan, termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non-dasar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada saat ini telah terjadi revolusi besar di masyarakat dalam hal berkomunikasi. Perubahan tersebut di dorong oleh semakin canggihnya teknologi komunikasi (Ikhbaluddin et.al 2022). Salah satu urusan wajib yang tidak kalah penting adalah pengelolaan informasi dan teknologi komunikasi, yang kini menjadi pondasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE hadir sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.Sejalan dengan tujuan SPBE, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengembangkan aplikasi SIMANIS (Sistem Manajemen Data dan Informasi) sebagai platform digital yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola dan melaporkan data sektoral.

Fenomena perkembangan smart city sangat erat kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Suatu wilayah perkotaan dapat disebut sebagai smart city ketika kota tesebut mampu melakukan implementasi terhadap inovasi berbasis TIK dalam pemerintahannya (Febriyani & Kartini, 2024) SIMANIS dirancang untuk mengatasi tantangan pengumpulan data secara manual yang kerap menghadapi kendala keterlambatan, inkonsistensi format, dan minimnya integrasi antar-OPD. Namun, dalam implementasinya sejak 13 Desember 2023, aplikasi ini masih menghadapi hambatan besar, terutama dari segi keterbatasan infrastruktur jaringan internet serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi.

Kondisi geografis Jayawijaya yang berada di wilayah pegunungan menjadi salah satu penghambat utama dalam penyediaan jaringan internet yang stabil, sehingga SIMANIS belum dapat diakses secara optimal di seluruh wilayah. Selain itu, rendahnya literasi digital pegawai OPD serta minimnya pelatihan teknis turut memengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan SIMANIS mampu mendukung pengumpulan data antar-OPD di Kabupaten Jayawijaya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan strategi pengembangannya ke depan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) umumnya berfokus pada aspek teknis seperti infrastruktur digital, kesiapan kelembagaan, serta manfaat e-government dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Penelitian-penelitian

tersebut banyak dilakukan di wilayah perkotaan atau daerah yang memiliki akses teknologi dan sumber daya manusia yang relatif memadai. Namun, belum banyak studi yang secara spesifik menyoroti penerapan sistem informasi sektoral seperti Aplikasi SIMANIS di wilayah terpencil dan geografis sulit seperti Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas efektivitas aplikasi sistem informasi pemerintahan umumnya menekankan aspek antarmuka pengguna, keamanan data, atau integrasi data antar instansi, tetapi masih minim yang mengkaji secara menyeluruh faktor-faktor lokal seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital aparatur OPD, serta tantangan geografis yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi sistem. Di sinilah letak kesenjangan penting yang belum banyak diteliti. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam penerapan aplikasi SIMANIS di Kabupaten Jayawijaya, dengan pendekatan gabungan antara analisis teknis, sumber daya manusia, dan konteks lokal. Fokus pada daerah tertinggal dan wilayah pegunungan juga memberikan kontribusi baru dalam literatur pengembangan e-government di Indonesia, khususnya pada konteks daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya untuk memperkuat landasan teori serta menunjukkan kebaruan dan relevansi topik yang diangkat. Salah satu penelitian terdahulu adalah penelitian berjudul Penerapan Aplikasi Administrasi Desa pada Desa Mukti Karya Mesuji (2022) yang menggunakan metode Research and Development (R&D). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada staf desa sebelum dan sesudah implementasi aplikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemudahan pelayanan administrasi meningkat dari 46,8% menjadi 94,4%. Penelitian ini relevan karena sama-sama menilai efektivitas penerapan aplikasi, meskipun fokusnya berbeda: penelitian terdahulu menitikberatkan pada pelayanan desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengumpulan data di OPD. Penelitian lain oleh Anita Ria (2018) dengan judul Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android pada Laporan Keuangan UMKM Mekarsari Depok menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif secara alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi keuangan yang diterapkan mencerminkan kesesuaian dengan standar kebijakan serta didukung oleh sistem yang memadai. Meskipun fokusnya pada sektor UMKM, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penekanan pada transparansi dan tata kelola yang lebih baik melalui pemanfaatan aplikasi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Reski Ananda (2024) berjudul Implementasi Aplikasi Emis 4.0 dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Data di Madrasah Aliyah As'adiyah Cabang Tosora menggunakan metode kualitatif dengan teori implementasi oleh Mukhibat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Emis 4.0 membuat pengelolaan data menjadi lebih akurat dan efisien. Relevansi penelitian ini terletak pada fokus terhadap efektivitas sistem digital dalam pengelolaan data, meskipun bidang kajiannya berbeda. Selanjutnya, penelitian oleh Andana Adytia Kusuma (2021) berjudul Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung menggunakan teori E-Government dari Indrajit dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis SWOT. Hasilnya menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, integrasi aplikasi, dan peningkatan kapasitas aparatur. Penelitian ini memiliki

kesamaan metode dan teori dengan penelitian yang sedang dilakukan, terutama dalam konteks implementasi E-Government. Penelitian oleh (Maktub, M. A.-K., Handayani, P. W., & Sunarso, F. P. 2025) menemukan bahwa kapasitas pemerintah secara signifikan memengaruhi ekspektasi kinerja. Selain itu, kualitas informasi dan kualitas layanan juga secara signifikan memengaruhi efikasi diri dalam penggunaan komputer. Selain itu, menurut (Gijon: 2025) Keterampilan TIK, kepercayaan terhadap teknologi, dan kualitas konektivitas internet menjadi faktor kunci dalam partisipasi efektif layanan e-government. Studi ini menegaskan bahwa kesenjangan digital tingkat kedua dan ketiga lebih dipengaruhi oleh perbedaan dalam kemampuan digital dan penggunaan efektif, bukan lagi semata-mata akses. Selain itu,

Andre Gioh (2023) melalui penelitiannya Pelayanan Publik E-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori dari Nuiyanto yang menekankan pada akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan efisiensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Government mampu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, meskipun masih menghadapi hambatan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur. Penelitian ini sejalan dengan fokus pada pelayanan publik melalui digitalisasi, tetapi dalam konteks tantangan lokal. Terakhir, penelitian berjudul Penerapan E-Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) (2022) menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, studi pustaka, dan teori dari Harvard JFK School of Government. Penelitian ini mengungkap adanya kendala teknis seperti sistem yang sering error, lambatnya pengiriman OTP, serta tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan teknis dalam implementasi E-Government skala besar dan menjadi pembanding yang relevan dalam mengkaji efektivitas sistem digital pelayanan publik di daerah lain.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam kebaruan ilmiah ini menggunakan Teori Enam Komponen Penting yang Harus Diperhatikan dalam Penerapan E-Government (Indrajit 2005:18) dan Dibandingkan dengan sejumlah penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dalam beberapa aspek penting. Penelitian Penerapan Aplikasi Administrasi Desa pada Desa Mukti Karya Mesuji (2022) menitikberatkan pada peningkatan efisiensi pelayanan administrasi di tingkat desa menggunakan metode Research and Development (R&D). Sementara penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas penggunaan sistem digital, tetapi juga secara lebih mendalam mengkaji faktor-faktor eksternal seperti kemauan masyarakat dan budaya lokal dalam menerima perubahan menuju digitalisasi, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian tersebut. Penelitian oleh Anita Ria (2018) membahas penerapan aplikasi keuangan dalam konteks UMKM dengan pendekatan kualitatif. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal pemanfaatan aplikasi digital untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola, fokus utama penelitian tersebut adalah pengelolaan keuangan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelayanan publik dalam konteks perizinan serta tantangan sosial-budaya yang menyertainya. Penelitian Sri Reski Ananda (2024) yang mengkaji aplikasi Emis 4.0 di lingkungan pendidikan memiliki kesamaan dalam penggunaan metode kualitatif

serta fokus pada efektivitas sistem digital, namun bidang kajian dan konteks institusinya berbeda. Penelitian ini lebih luas karena tidak hanya menilai efektivitas, tetapi juga menggali hambatan implementasi yang bersumber dari masyarakat secara sosial dan kultural. Penelitian oleh Andana Adytia Kusuma (2021) juga meneliti penerapan E-Government pada DPMPTSP, tetapi lebih fokus pada sisi internal organisasi seperti peningkatan kapasitas aparatur dan integrasi sistem. Penelitian ini melengkapi sudut pandang tersebut dengan melihat aspek eksternal, khususnya resistensi masyarakat terhadap perubahan, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

Penelitian Andre Gioh (2023) menekankan pada manfaat e-government dari sisi akuntabilitas dan partisipasi publik, serta hambatan SDM dan infrastruktur. Perbedaan mencolok dari penelitian ini adalah penekanan pada faktor budaya lokal dan kemauan masyarakat sebagai hambatan non-teknis yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya. Sementara itu, penelitian tentang aplikasi JAKI (2022) di DKI Jakarta mengungkap berbagai tantangan teknis seperti sistem yang error dan lambatnya verifikasi pengguna. Penelitian ini berbeda karena fokusnya bukan pada tantangan teknis, melainkan lebih kepada dinamika sosial-budaya lokal dan bagaimana hal tersebut memengaruhi adopsi sistem digital dalam pelayanan publik, khususnya di wilayah yang relatif kecil seperti Jayawijaya. Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada integrasi antara faktor internal dan eksternal dalam analisis implementasi e-government, serta sorotan khusus pada pengaruh budaya lokal dan kemauan masyarakat terhadap keberhasilan digitalisasi layanan publik. Fokus ini belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek teknis, sistem, atau kelembagaan semata..

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi SIMANIS dalam meningkatkan pengelolaan data dan informasi antar OPD di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada penyelidikan mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia melalui data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Juga menggunakan metode kuantitatif sederhana dengan menggunakan kuesioner guna mendukung data yang ada Menurut John W. Creswell (2014). Penelitian ini dilaksanakan selama tiga minggu, berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayawijaya serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aktif menggunakan aplikasi SIMANIS. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, analisis dokumentasi, serta penyebaran kuesioner. Wawancara dilakukan dengan panduan yang fleksibel agar peneliti dapat mengeksplorasi informasi yang lebih dalam terkait pengalaman, persepsi, dan tantangan penggunaan aplikasi SIMANIS. Observasi dilakukan secara langsung dengan terlibat dalam kegiatan administratif dan teknis yang menggunakan aplikasi tersebut, sementara dokumentasi mencakup pengumpulan data dari regulasi, laporan internal, serta arsip penggunaan aplikasi. Kuesioner disusun dengan skala Likert dan disebarkan kepada 16 OPD yang menggunakan aplikasi SIMANIS. Sumber data menurut Creswell (2014) adalah bahan yang

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang bisa berasal dari wawancara, dokumen, observasi, atau audiiovisual. Sumber data menjadi subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data ini dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, tergantung pada bagaimana data tersebut dikumpulkan Arikunto (2010).Instrumen kuesioner disusun berdasarkan lima dimensi utama dalam penerapan sistem E-Government, yaitu: Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, dan Citizen Interface. Responden dipilih secara purposive dari masing-masing OPD, dengan kriteria sebagai staf pengolah data (PEDASI) atau admin aplikasi yang terlibat langsung dalam operasional SIMANIS. Kuesioner ini juga telah divalidasi oleh dosen pembimbing serta tenaga ahli di bidang teknologi informasi pemerintahan untuk menjamin kejelasan, relevansi, dan reliabilitas. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih terdiri dari pejabat struktural dan staf teknis yang memahami secara mendalam proses implementasi dan penggunaan aplikasi SIMANIS. Jabatan informan meliputi Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Statistik, Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi, serta para administrator SIMANIS dari beberapa OPD seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kependudukan. Informan-informan ini dipilih karena mereka memiliki posisi strategis dalam kebijakan dan operasional sistem informasi di instansi masing-masing, serta terlibat langsung dalam proses penginputan, pengelolaan, dan pemanfaatan data melalui aplikasi SIMANIS. Oleh karena itu, mereka dinilai mampu memberikan informasi yang relevan, komprehensif, dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Melalui kombinasi metode dan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi aplikasi SIMANIS di Kabupaten Jayawijaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penerapan *e-government* di dinas Kominfo Jayawijaya di mana informasi dan hasil penelitian disajikan secara netral dan menyampaikan penafsiran serta arti dari hasil tersebut. Hasil dan analisis yang telah diperoleh oleh peneliti, didasarkan pada pengamatan lapangan yang sesuai dengan pedoman wawancara dan informan atau sumber yang telah ditetapkan. Pembahasan ini, peneliti membahasnya sesuai dengan teori yang sudah peneliti ambil yaitu mengenai Teori Enam Komponen Penting yang Harus Diperhatikan dalam Penerapan E-Government (Indrajit 2005:18), yaitu : Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interface dan Capital.

- ***Content Development***

Content Development dalam aplikasi SIMANIS berfokus pada pengembangan sistem yang mencakup pemilihan standar teknis, bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, dan kesesuaian antarmuka pengguna dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana konten, fitur, dan mekanisme kerja aplikasi SIMANIS telah disusun untuk mendukung pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara efektif dan efisien. Aplikasi SIMANIS memiliki dua jenis akun: Admin Pusat DISKOMINFO

Jayawijaya dan admin OPD. Admin Pusat memiliki akses penuh untuk memantau dan mengelola data dari semua OPD, memastikan validitas data, dan mengelola keseluruhan sistem. Sebaliknya, admin OPD hanya dapat mengelola data yang berkaitan dengan instansinya sendiri. Struktur akses ini dirancang untuk menjaga keamanan data dan memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara pengguna. Berdasarkan wawancara dengan pengguna, konten aplikasi SIMANIS dinilai cukup membantu dalam pengelolaan data, meskipun terdapat beberapa kategori data yang belum sepenuhnya mewakili semua jenis data yang diperlukan oleh OPD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah seorang admin OPD di Dinas Perhubungan pada tanggal 15 januari beliau mengemukakan :

> "Secara umum, konten dalam aplikasi SIMANIS cukup membantudan mudah digunakan dalam pengelolaan data di Dinas Perhubungan. Namun, ada beberapa kategori data yang belum sepenuhnya mewakili semua jenis data untuk semua OPD yang menggunakan SIMANIS sehingga membuat data yang disimpan menjadi berantakan"

Begitu pula wawancara yang peneliti lakukan pada salah seorang admin dari kantor dinas kependudukan kabupaten jayawijaya yang juga mengatakan bahwa aplikasi SIMANIS mudah untuk dijalankan dan juga karena jaringan yang mendukung :

> "Pengalaman saya dalam menginput data statistik sektoral menggunakan SIMANIS cukup membantu. Kami bisa langsung memasukkan data yang diminta oleh Diskominfo tanpa harus mengirim secara manual seperti dulu. Selama jaringan internet stabil, proses input berjalan lancar. Tantangannya hanya saat data harus diperbarui cepat sementara koneksi kurang mendukung. Tapi secara keseluruhan, aplikasi ini membuat proses pelaporan jadi lebih efisien dan tertata."

Akun Admin Pusat DISKOMINFO Jayawijaya pada aplikasi SIMANIS memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sistem, yang mencakup pengaturan kategori data, manajemen akun admin OPD, serta pengelolaan dan validasi data dari seluruh OPD. Akun ini dikelola secara langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayawijaya, dan dilengkapi dengan sejumlah fitur utama Hasil kuesioner menunjukkan bahwa konten aplikasi mudah dimengerti (rata-rata 4.31) dan fitur-fitur yang disediakan tersusun secara logis dan mudah diakses (rata-rata 4.50). Namun, masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan kategori data teknis yang lebih mendetail dan fitur penyesuaian sesuai dengan karakteristik masing-masing OPD. Pembaruan aplikasi dilakukan secara berkala dan diinformasikan dengan baik, dengan skor 4.44, menunjukkan bahwa meskipun pembaruan masih bersifat minor, hal tersebut dilakukan secara teratur dan tidak mengganggu kenyamanan penggunaan aplikasi. Dokumentasi penggunaan aplikasi juga dinilai memadai, meskipun perlu ditingkatkan untuk mendukung pengguna baru dan mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Dashboard aplikasi SIMANIS dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur, termasuk kategori data, pengelolaan akun OPD, dan fitur-fitur yang mendukung efisiensi dalam manajemen informasi. Pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini menyederhanakan proses pelaporan, meningkatkan efisiensi kerja, dan meminimalisasi penggunaan metode manual dalam pengiriman data. Secara keseluruhan, aplikasi SIMANIS telah menunjukkan efektivitas yang baik dalam mendukung pengelolaan data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Namun, untuk memastikan sistem ini tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna lintas sektor, diperlukan komitmen untuk pengembangan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan fleksibilitas dan skalabilitas sistem, serta perbaikan dalam dokumentasi dan pelatihan pengguna agar aplikasi dapat terus berfungsi secara optimal dalam mendukung tata kelola data yang terintegrasi dan akurat.

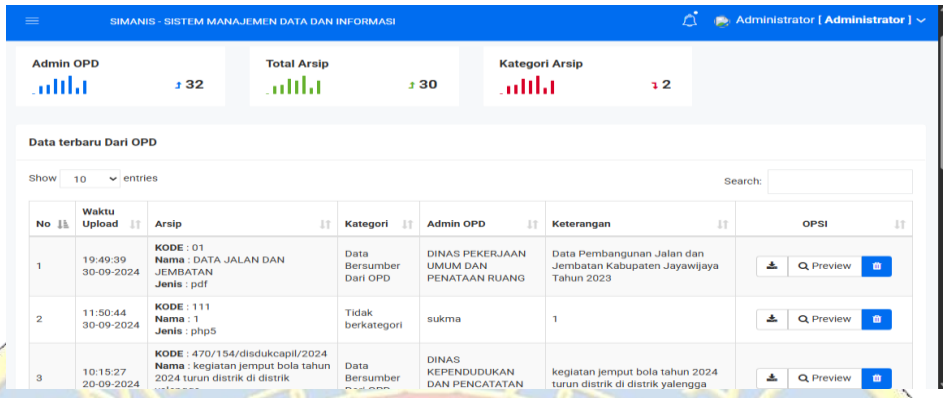

Gambar 3.1
Dashboard aplikasi SIMANIS
Sumber : Aplikasi SIMANIS (2025)

Gambar di atas menampilkan halaman dashboard aplikasi SIMANIS yang menyajikan informasi mengenai ulasan dari admin OPD, total arsip yang telah terinput, serta kategori arsip yang tersedia. Selain itu, dashboard tersebut juga menampilkan data terbaru yang baru saja ditambahkan oleh admin OPD.

Tabel 4.5. Hasil Kuesioner Content Development

No	Nama OPD	1.Konten dalam aplikasi SIMANIS mudah dimengerti oleh saya sebagai pengguna	2.Menu dan fitur dalam aplikasi disusun secara logis dan mudah diakses	3.Aplikasi menyediakan informasi yang lengkap untuk mendukung pekerjaan saya.	4.Terdapat dokumentasi penggunaan aplikasi yang mudah dipahami.	5. Pembaruan aplikasi dilakukan secara berkala dan diinformasikan dengan baik
1	KESBANGPOL	4	5	4	5	5
2	RSUD	5	5	4	4	5
3	Dinas Perhubungan	5	4	5	4	4
4	Dinas Kependudukan	5	4	4	5	4
5	Dinas Lingkungan Hidup	4	4	4	5	5
6	PLN	4	4	5	4	5
7	Dinas Pendidikan	5	5	4	3	5
8	Dinas Sosial	4	5	4	5	5

9	Dinas Olahraga dan Pemuda	4	4	4	4	4
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	5	4	4	4
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	5	4	5	4
12	Dinas Pertanian	4	4	5	4	4
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	5	5	4	4
14	SATPOL PP	4	5	4	4	5
15	Dinas Ketahanan Pangan	4	4	4	3	3
16	Inspektorat	5	4	4	4	5
Jumlah		69	72	68	67	71
rata rata jawaban		4.3125	4.5	4.25	4.1875	4.4375
nilai per indicator		4.3375				
NAMA INDIKATOR		CONTENT DEVELOPMEN				

Sumber : Diolah Penulis (2025)

- ***Competency Building***

Competency Building berfokus pada pengadaan sumber daya manusia (SDM), pelatihan, dan pengembangan kompetensi serta keahlian seluruh jajaran SDM di berbagai lini pemerintahan. Pengembangan kompetensi sangat penting pada tahap ini, karena tanpa pemahaman yang memadai mengenai aplikasi SIMANIS, kemungkinan besar aplikasi ini tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Dalam pengamatan terhadap implementasi aplikasi SIMANIS di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tingkat pemahaman pengguna menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas aplikasi. Pemahaman yang baik terhadap penggunaan aplikasi mendukung kelancaran pengumpulan dan pengelolaan data sektoral, terutama karena SIMANIS dirancang untuk mempermudah alur pelaporan data antar OPD. Keberhasilan implementasi aplikasi ini sangat bergantung pada sejauh mana pengguna, baik dari pusat maupun OPD, mampu mengoperasikannya secara mandiri dan efisien.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Data dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman pengguna terhadap aplikasi secara umum sudah baik. Beliau menyampaikan:

> "Secara keseluruhan, aplikasi ini cukup efektif digunakan. Kami sudah memberikan pelatihan kepada OPD, dan sebagian besar sudah bisa mengoperasikan aplikasi dengan baik. Tampilan yang sederhana memudahkan pengguna dalam memahami alur kerja. Aplikasi ini juga mempercepat proses pelaporan data ke Diskominfo, terutama dari OPD-OPD di wilayah perkotaan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang telah diberikan memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan literasi digital pegawai OPD terhadap aplikasi. Kemudahan dalam memahami tampilan dan alur kerja aplikasi menjadi faktor kunci dalam percepatan proses pengumpulan data. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna dari OPD telah memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam mengoperasikan aplikasi, yang tercermin dari kelancaran proses input

dan pelaporan data tanpa hambatan teknis yang berarti. Untuk memahami dukungan institusional terhadap penguasaan teknis aplikasi SIMANIS, peneliti melakukan penelusuran terhadap keberadaan dan efektivitas pelatihan yang diselenggarakan bagi para pengguna aplikasi di OPD. Pelatihan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem, terutama dalam konteks kesiapan SDM untuk mengoperasikan teknologi baru secara optimal. Melalui observasi dan wawancara di Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, peneliti mengidentifikasi sejauh mana program pelatihan mampu meningkatkan kapasitas pengguna aplikasi. Salah seorang perwakilan dari Dinas Perhubungan menyatakan:

> "Iya, cukup mudah digunakan. Fitur-fiturnya cukup jelas, dan setelah mengikuti pelatihan, kami jadi lebih paham cara menginput data. Meski ada beberapa hal teknis yang perlu penyesuaian, aplikasinya tidak rumit."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatihan berperan dalam membantu pengguna memahami alur kerja aplikasi dengan lebih baik, meskipun masih ada tantangan teknis yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Observasi mencatat bahwa pelatihan penggunaan aplikasi SIMANIS telah dilaksanakan dan berdampak positif terhadap pemahaman pengguna. Pengguna mampu menavigasi antarmuka aplikasi dengan percaya diri, menunjukkan bahwa materi pelatihan cukup relevan dan efektif. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga fungsional dalam meningkatkan literasi digital pegawai di OPD. Dengan demikian, pelatihan yang rutin dan terstruktur menjadi komponen penting dalam menjaga efektivitas penggunaan SIMANIS sebagai alat pengelolaan data sektoral.

Gambar 4.13: Launching Aplikasi SIMANIS

Gambar di atas menunjukkan momen kebersamaan usai kegiatan Launching Aplikasi SIMANIS yang resmi digelar di Wamena pada 13 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut, Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.AP, secara resmi membuka kegiatan Seminar dan Pembinaan Data Statistik Sektoral serta meresmikan peluncuran Aplikasi SIMANIS. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayawijaya, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, dan melibatkan perwakilan dari berbagai OPD. Dalam sambutannya, Drs. Tinggal Wusono menegaskan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat dan terpercaya sebagai dasar dalam penelitian dan perumusan kebijakan di setiap sektor pembangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan data antar perangkat daerah, guna mencegah perbedaan data yang dapat menghambat proses pembangunan. Secara keseluruhan, Competency Building melalui

pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SIMANIS, sehingga mendukung pengelolaan data yang lebih baik di lingkungan pemerintahan daerah.

- ***Connectivity***

Connectivity berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi untuk penerapan E-Government. Dalam konteks aplikasi SIMANIS, konektivitas sangat penting untuk memastikan aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Peneliti menelusuri kesiapan infrastruktur TI di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung operasional aplikasi. Wawancara dengan admin Dinas Kependudukan menunjukkan bahwa infrastruktur TI di kantor mereka sudah memadai, dengan perangkat yang layak untuk pengiriman data. Hasil uji kecepatan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menunjukkan kecepatan unduhan 71,29 Mbps dan unggahan 12,72 Mbps, yang mendukung aktivitas digital. Diskominfo juga memiliki server lokal dan SDM teknis yang terlatih, mendukung transformasi digital. Penggunaan teknologi Starlink membantu mengatasi tantangan geografis dalam pembangunan infrastruktur jaringan. Kecepatan dan kestabilan jaringan internet sangat penting untuk kelancaran pengolahan dan pengiriman data. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa jaringan di pusat kota cukup baik, tetapi OPD di pinggiran kota mengalami kendala stabilitas. Survei kuesioner kepada 16 OPD menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa cukup mampu mengakses dan menjalankan aplikasi dalam kondisi normal, dengan nilai rata-rata tertinggi pada indikator “akses jaringan internet” dan “kelancaran penggunaan aplikasi” (skor 2,8125 dari skala 4). Pemerintah daerah perlu memperluas jaringan internet berkualitas ke wilayah terpencil untuk memastikan semua OPD dapat menjalankan tugas secara digital dan efisien. Karena, sistem digital mampu meningkatkan efisiensi pencatatan, memudahkan klasifikasi keluhan, serta membuka akses partisipasi masyarakat yang lebih luas, terutama dari wilayah terpencil (Fahlevvi et.al 2025)

- ***Cyber Laws***

Dalam menjaga keamanan data aplikasi SIMANIS, kepatuhan terhadap regulasi sangat penting. Peneliti menyoroti bagaimana aplikasi ini dirancang sesuai dengan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam pemerintahan digital. Penerapan sistem informasi digital memerlukan perhatian pada aspek hukum dan perlindungan data. Hukum siber (Cyber Laws) mengatur pengelolaan data digital, termasuk integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah syarat utama untuk keamanan sistem informasi, termasuk SIMANIS. Di Kabupaten Jayawijaya, SIMANIS telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mencakup: Kerahasiaan Data: Akses dibatasi untuk admin resmi OPD. Keutuhan Data: Dijamin melalui autentikasi pengguna. Ketersediaan Data: Diskominfo menyediakan sistem backup. Tanggung Jawab Kelembagaan: OPD wajib menerapkan keamanan sesuai peraturan. Perlindungan data adalah aspek fundamental dalam pengelolaan informasi antar OPD. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa sistem SIMANIS dibangun dengan pengamanan berlapis dan hanya dapat diakses oleh admin resmi. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam

menjaga kerahasiaan dan validitas data. Dengan demikian, SIMANIS tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keamanan data, sesuai dengan regulasi nasional dan daerah.

- ***Citizen Interface***

Untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan (usability) antarmuka aplikasi SIMANIS, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola sistem dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya serta perwakilan pengguna dari OPD. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tampilan dan fitur aplikasi telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bapak Rein E. Rumbiak, Admin SIMANIS, menjelaskan

> "User interface aplikasi SIMANIS dirancang sesederhana mungkin agar mudah digunakan oleh semua kalangan, terutama pegawai OPD yang belum terbiasa dengan sistem digital. Fitur-fiturnya cukup jelas, dan setelah mengikuti pelatihan, kami jadi lebih paham cara menginput data."

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIMANIS memenuhi prinsip usability dalam konteks E-Government. Antarmuka yang sederhana dan intuitif mendukung efektivitas kerja ASN di Kabupaten Jayawijaya Antarmuka pengguna merupakan elemen vital dalam keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan. SIMANIS menghadirkan desain antarmuka yang sederhana namun fungsional, memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja. Dashboard menyajikan informasi penting secara ringkas, seperti jumlah admin OPD, total arsip, dan kategori arsip, serta dilengkapi dengan tabel data arsip terbaru. Fitur pencarian dan tombol "Preview" meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi kerja. Kedua tampilan tersebut mencerminkan prinsip multi access channels dalam E-Government, di mana pengguna dari berbagai lokasi dan perangkat dapat mengakses sistem dengan nyaman. SIMANIS memberikan kemudahan bagi SDM di berbagai tingkatan untuk berkontribusi dalam pengelolaan informasi pemerintahan yang lebih transparan dan modern. Secara keseluruhan, SIMANIS berhasil menyajikan antarmuka yang fungsional dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan.

- ***Capital***

Dimensi ini membahas pola permodalan proyek E-Government, khususnya terkait biaya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMANIS. Keberlangsungan operasional aplikasi ini sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai Ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam efektivitas SIMANIS. Menurut Admin SIMANIS, Rein E. Rumbiak:

> "Anggaran yang dialokasikan sudah cukup untuk pemeliharaan rutin, tetapi untuk pengembangan fitur besar, kami butuh dukungan tambahan."

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 menyatakan bahwa pembiayaan aplikasi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih dari 3,7 miliar rupiah untuk memastikan ketersediaan jaringan internet yang diperlukan. Pendanaan adalah elemen kunci untuk keberlanjutan SIMANIS. Peraturan Bupati menegaskan bahwa pendanaan berasal dari APBD dan sumber legal lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Arklaus Wandesi, menyatakan bahwa rencana pengembangan SIMANIS telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah. Secara keseluruhan, ketersediaan dana yang terencana dan berkelanjutan adalah pondasi utama untuk memastikan SIMANIS dapat terus berkembang sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Jayawijaya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan aplikasi SIMANIS di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Dalam dimensi support, terdapat tantangan berupa sosialisasi yang kurang kepada masyarakat dan rendahnya literasi digital. Selain itu, dalam dimensi capacity, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan.

Penelitian Karya Mesuji (2022) mengenai penerapan aplikasi administrasi desa di Desa Mukti menemukan bahwa tingkat kemudahan pelayanan administrasi meningkat dari 46,8% menjadi 94,4%. Namun, hambatan dalam sosialisasi dan budaya lokal tetap menjadi tantangan dalam penerapan teknologi baru. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Andana et al., 2021) yang menemukan bahwa kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai sistem online menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru.Penelitian Anita Ria (2018) tentang aplikasi keuangan berbasis Android pada UMKM Mekarsari Depok menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan aplikasi mencerminkan kesesuaian standar kebijakan dan tujuan. Namun, tantangan dalam tata kelola dan transparansi tetap ada, yang juga dihadapi oleh SIMANIS dalam konteks pengelolaan data OPD.Penelitian Sri Reski Ananda (2024) mengenai implementasi aplikasi Emis 4.0 di Madrasah Aliyah As'adiyah menemukan bahwa aplikasi ini meningkatkan efektivitas pengelolaan data keuangan. Meskipun demikian, tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur tetap relevan, mirip dengan yang dihadapi SIMANIS.Penelitian Andana Adytia Kusuma (2021) mengenai penerapan E-Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan sosialisasi, integrasi aplikasi, dan kapasitas aparatur. Hal ini sejalan dengan temuan penulis bahwa sosialisasi yang kurang dan rendahnya literasi digital menjadi penghambat dalam penerapan SIMANIS.Penelitian Andre Gioh (2023) tentang pelayanan publik E-Government di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa menemukan bahwa meskipun penerapan E-Government meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat kendala terkait SDM dan infrastruktur. Ini mencerminkan tantangan yang sama di SIMANIS, di mana keterbatasan infrastruktur dan kesiapan SDM menjadi penghambat.Penelitian (Sukendar et al., 2023) mengenai Sistem Informasi Perizinan Elektronik Cilegon (SIPECI) menunjukkan bahwa kendala pada dimensi capacity terkait rendahnya kompetensi pegawai akibat kurangnya pelatihan. Meskipun dukungan dari pimpinan untuk SIPECI kuat, penelitian penulis menemukan bahwa kendala yang dihadapi SIMANIS juga terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, seperti server dan jaringan internet yang tidak stabil. Dukungan pimpinan untuk SIMANIS juga sangat kuat, didukung oleh regulasi yang jelas dan komitmen politik yang nyata.Penelitian (Utami, 2021) menemukan bahwa hambatan penerapan e-government sering kali terkait dengan masalah teknis (server, jaringan) dan kurangnya pelatihan SDM. Penelitian penulis menyoroti dimensi support yang berkaitan dengan kurangnya sosialisasi intensif dan rendahnya literasi digital masyarakat, serta dimensi capacity yang mencakup keterbatasan infrastruktur TI dan SDM, dan dimensi local culture yang berkaitan dengan resistensi budaya terhadap digitalisasi.

Penelitian (Sari et al., 2023) menunjukkan bahwa meskipun aplikasi layanan telah mematuhi prosedur SOP, efektivitas layanan masih terhambat oleh kendala dimensi support terkait sarana prasarana teknologi dan jaringan yang kurang memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa anggaran daerah yang terbatas menghambat optimalisasi fasilitas. Keduanya memiliki kesamaan

bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi dan SDM menjadi kendala utama dalam penerapan e-government.Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menggambarkan bahwa penerapan e-government di Kabupaten Jayawijaya, khususnya melalui aplikasi SIMANIS, dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Di antaranya adalah dalam dimensi support yang mencakup minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan rendahnya literasi digital, dimensi capacity yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta dimensi local culture yang terkait dengan resistensi budaya dan kebiasaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan teknologi informasi di sektor publik sering kali melibatkan aspek sosialisasi, kapasitas, dan budaya lokal.Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui peningkatan sosialisasi, pelatihan SDM, dan penguatan infrastruktur teknologi. Hal ini akan mendukung keberhasilan implementasi SIMANIS dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa dari 6 dimensi yang diujikan berupa *Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interface dan Capital*. Terdapat ada indikator yang menjadi hambatan dalam penerapan SIMANIS di OPD Kabupaten Jayawijaya. Salah satu indikator yang paling signifikan sebagai hambatan adalah connectivity, di mana infrastruktur jaringan internet menjadi tantangan dan masalah utama. Keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet yang tidak stabil menghambat efektivitas penggunaan aplikasi SIMANIS, sehingga mengurangi kemampuan OPD dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi SIMANIS dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, khususnya dalam hal konektivitas internet, agar penerapan SIMANIS dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh OPD dan masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, penguatan infrastruktur jaringan internet harus menjadi prioritas dalam upaya mendukung implementasi sistem informasi pemerintahan yang berbasis digital, sehingga dapat mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan aplikasi SIMANIS menunjukkan efektivitas yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan ruang untuk perbaikan dalam beberapa aspek. Dalam hal Content Development, konten SIMANIS umumnya sesuai dengan kebutuhan OPD, dengan pelatihan yang membantu penggunaan aplikasi, dan dinilai mudah digunakan dengan rata-rata skor 4,34 dari 5, meskipun pengembangan fitur masih diperlukan. Pada dimensi Competency Building, sebagian besar staf OPD mampu mengoperasikan aplikasi berkat pelatihan yang dilakukan, dengan skor rata-rata 4,1 yang menunjukkan efektivitas pelatihan, meskipun pelatihan lanjutan tetap dibutuhkan. Namun, Connectivity menjadi kendala utama, terutama di OPD wilayah pinggiran, di mana jaringan internet tidak selalu stabil, dengan skor rata-rata 2,4375–2,3125 pada indikator kecepatan dan aksesibilitas jaringan yang menunjukkan kategori "BURUK", mencerminkan perlunya pemerataan infrastruktur internet. Dalam hal Cyber Laws, SIMANIS telah dirancang dengan sistem keamanan berlapis dan mengikuti regulasi perlindungan data, dengan rata-rata skor 3,64 yang menunjukkan pemahaman yang baik, tetapi masih perlu

peningkatan pada aspek teknis. Antarmuka aplikasi, yang dinilai sederhana dan mudah digunakan, mendapatkan rata-rata nilai 4,4 pada dimensi Citizen Interface, meskipun ada ruang untuk perbaikan dalam kenyamanan visual. Terakhir, untuk dimensi Capital, anggaran saat ini cukup untuk pemeliharaan rutin, dan rencana pengembangan lanjutan telah disiapkan dalam dokumen strategis, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan. Secara keseluruhan, perhatian terhadap tantangan yang ada dan upaya perbaikan di setiap dimensi sangat penting untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fokus penelitian hanya pada penerapan aplikasi SIMANIS di OPD Kabupaten Jayawijaya, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Kedua, data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara dapat mengandung bias subjektif. Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah pinggiran, dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerapan SIMANIS, seperti kebijakan pemerintah yang berubah. Terakhir, penelitian ini tidak mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penerapan SIMANIS terhadap kinerja OPD dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif..

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih terbatas, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan aplikasi SIMANIS. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada aspek teknis dan infrastruktur jaringan, serta pengembangan fitur aplikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di OPD. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penerapan SIMANIS terhadap kinerja OPD dan kepuasan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas sistem informasi pemerintahan di daerah ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jayawijya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(2), 45–60.

Creswell, J. W. (2014). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. *Jurnal Metodologi Penelitian Kualitatif*, 14(3), 112–124

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(2), 78–90.

Dimas, M., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *6*(2), 194–215. https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4504

Fahlevvi, M. R., Kale'e, A. P., & Abdullah, M. F. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK: RANCANGAN WEBSITE UNTUK MENANGGAPI ASPIRASI MASYARAKAT DI DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *8*(3), 1-10. https://doi.org/10.9963/e4qmnt92

Fatimah, Y., & Ruhana, F. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNANCE DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 211–230. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3563

Febriyani, S. A., & Kartini, D. S. (2024). IMPLEMENTASI SMART GOVERNMENT DI KANTOR LURAH GUNTUNG, KOTA BONTANG. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 14(1), 64–72. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i1.39293681

Gijón, M., Fernández-Bonilla, L., & Ruíz-Rúa, A. (2025). The digital divide in e-government: Evidence from internet and e-service adoption in Europe. *Marine Policy*, *158*, 105837. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.105837

Ikhbaluddin, I., & Kawuryan, M. W. (2022). Information Technology Development (Website) in Supporting Government Communication in Depok City, West Java Province. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, *4*(1), 50-76. https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i1.2699

Indrajit, R. E. (2005). E-Government in action. Andi.

Jonathan, G. M., Perjons, E., & Rusu, L. (2024). Digital Transformation-driven Decentralisation of Public Governance. *Procedia Computer Science*, *239*, 1220–1229. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.290

Karno, K., Masrich, A., Yahya, A. S., & Nooraini, A. (2020). The Impact of the Government Revolution 4.0 on District Integrated Administration Service (DIAS). *JURNAL ILMU SOSIAL*, *19*(2), 160–179. https://doi.org/10.14710/jis.19.2.2020.160-179

Madjid, U., Kawuryan, M. W., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 48-61. https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778

Maktub, M. A.-K., Handayani, P. W., & Sunarso, F. P. (2025). Penerimaan dan penggunaan aplikasi e-government Jakarta Kini (JAKI): Model UMEGA yang diperluas. *Heliyon*, 11, e42078. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42078

Nugroho, E. (2008). *Sistem Informasi Manajemen : konsep aplikasi, dan perkembangannya* (2nd ed.). Andi Offset.

Ramadhania, A., Muradi, & Sutisna, J. (2023). Penerapan E-Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(1), 29–48. https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.146

Wargadinata, E. L. (2021). HUBUNGAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN POGRAM SMART-KAMPUNG KABUPATEN BANYUWANGI. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11(1), 47–64. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1449